



LAPORAN KINERJA PUSLITJAK 2020



Analisis Survei Cepat

Pembelajaran dari Rumah dalam
Masa Pencegahan COVID-19

PLATFORM
PEMBELAJARAN
DIGITAL
DAN STRATEGI
INKLUSIVITAS
PENDIDIKAN
DI INDONESIA



TIGA GENRE Tari Bali



Mengukur Capaian
Program
Gerakan Literasi Sekolah



UJIAN
YANG IDEAL
DI MASA
MENDATANG



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas berkat dan rahmat-Nya, Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjak Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud) dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2020. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Puslitjak dalam membantu Kepala Balitbang dan Perbukuan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Laporan Kinerja ini menyajikan informasi target dan capaian kinerja Puslitjak pada tahun 2020 dengan mengacu pada indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, Puslitjak memiliki satu Sasaran Kegiatan yang diukur melalui tiga Indikator Kinerja Kegiatan sebagai dasar acuan penilaian untuk mengevaluasi capaian kinerja yang akuntabel. Selain digunakan untuk mendorong peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja ini juga digunakan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Puslitjak sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini baik dalam bentuk kontribusi data, penulisan laporan, maupun bentuk lainnya.

Jakarta, 31 Januari 2021

Plt. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan,



Irsyad Zamjani

NIP 198008302009121002

DAFTAR ISI

i	KATA PENGANTAR
ii	DAFTAR ISI
iii	IKHTISAR EKSEKUTIF
1	BAB I PENDAHULUAN
	1 Gambaran Umum
	1 Dasar Hukum
	2 Tugas dan Fungsi
	2 Struktur Organisasi
	3 Permasalahan
4	BAB II PERENCANAAN KINERJA
	4 Visi dan Misi
	5 Tujuan dan Sasaran Strategis
	5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020
7	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
	7 Capaian Kinerja Puslitjak
	27 Realisasi Anggaran
	28 Efisiensi Anggaran
29	BAB IV PENUTUP
	29 Kesimpulan
	31 Rekomendasi
32	LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 menyajikan tingkat pencapaian satu sasaran dengan tiga indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Secara umum, ringkasan capaian indikator kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut:

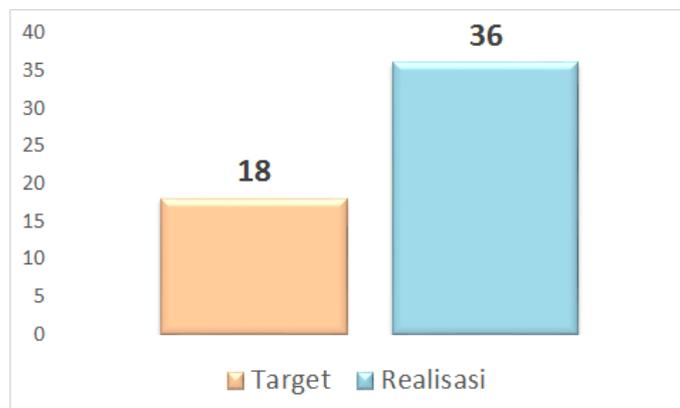
Sasaran Kegiatan:

Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan

IKK #1

Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan

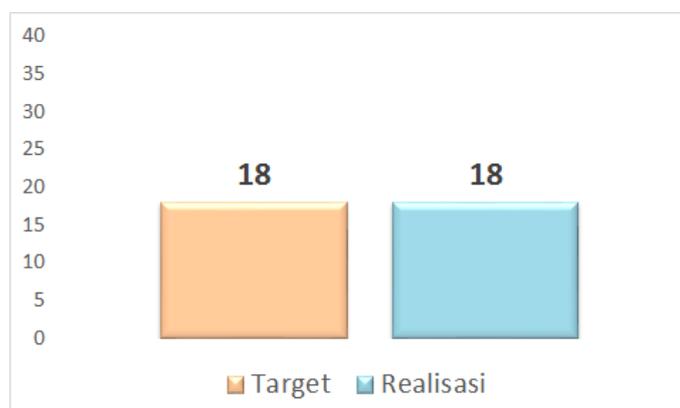
Capaian Tahun 2020



IKK #2

Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan

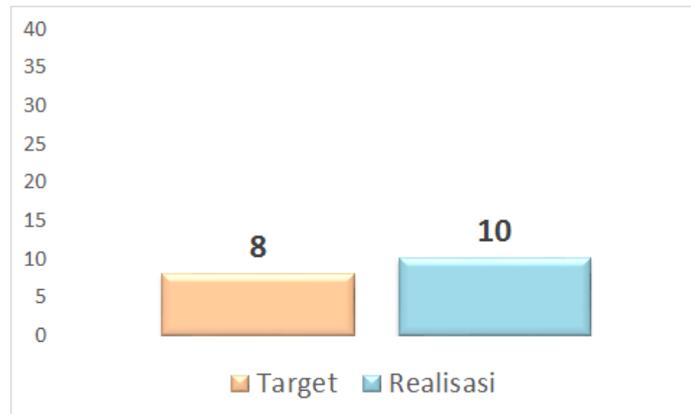
Capaian Tahun 2020



IKK #3

Jumlah hasil fasilitasi dan desiminasi hasil penelitian

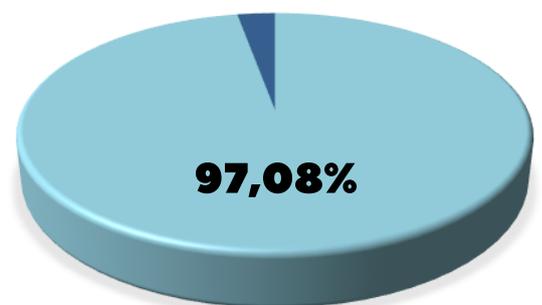
Capaian Tahun 2020



KINERJA REALISASI ANGGARAN

PAGU Rp31.005.084.000,00

REALISASI Rp30.101.264.799,00



HAMBATAN/KENDALA

- Adanya pandemi COVID-19 yang mendorong perlunya penyesuaian dalam penganggaran, proses *review* proposal hingga metode pelaksanaan kegiatan

LANGKAH ANTISIPASI

- Melaksanakan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan
- Penelitian lapangan diubah menjadi penelitian *desk study* dan mengubah sebagian kegiatan rapat tatap muka dengan pertemuan daring (*Zoom meeting*)



PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum



Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) merupakan salah satu Pusat dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud).

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
9. Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud) Tahun 2020-2024.

C. Tugas dan Fungsi



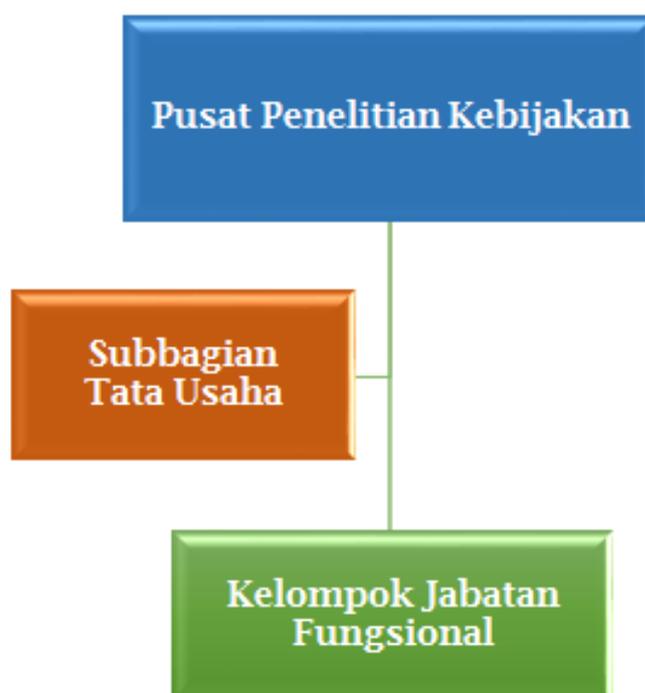
Pusat Penelitian Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan serta urusan ketatausahaan Pusat.



Pusat Penelitian Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan kebijakan teknis di bidang penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan;
2. Pelaksanaan penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan;
3. Pengelolaan jaringan dan pangkalan data penelitian kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penelitian kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

D. Struktur Organisasi



Profil Sumber Daya Manusia



E. Isu Strategis



1. Pendidikan dan Kebudayaan di Masa Pandemi COVID-19
2. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar
3. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Guru
4. Penjaminan Mutu dan Peningkatan Tata Kelola Pendidikan
5. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya



PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Visi Puslitjak



Visi Puslitjak adalah menjadi lembaga penelitian yang kredibel dan profesional, yang menjadi rujukan penting dalam pengembangan pengetahuan dan kebijakan baik secara nasional maupun internasional.

Misi Puslitjak



1. Meningkatkan kualitas hasil penelitian sebagai acuan dalam kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
2. Mengembangkan konsep dan strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang relevan dengan dinamika perubahan.
3. Meningkatkan intensitas dan kualitas kerja sama nasional dan internasional di bidang penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya dalam mendukung penelitian dan pengembangan.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

"Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan"

Tujuan Strategis

Sasaran Strategis

"Meningkatnya jumlah hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan"



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

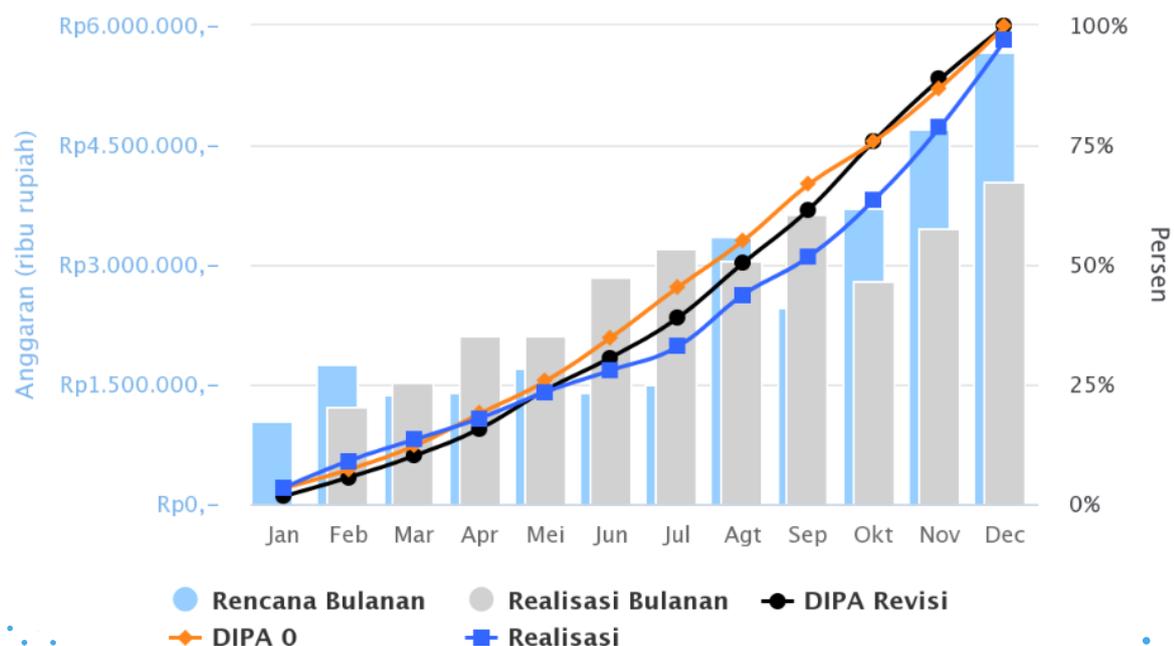
SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET
TERSEDIAANYA HASIL PENELITIAN YANG BERKUALITAS DAN RELEVAN SEBAGAI ACUAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah Hasil Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan	18 Laporan Penelitian
	Jumlah Hasil Kajian Isu Aktual Pendidikan dan Kebudayaan	18 Laporan Penelitian
	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Desiminasi Hasil Penelitian	8 Dokumen

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Kajian Isu Aktual	Rp 2.681.334.000
2	Fasilitasi dan Desiminasi Hasil Penelitian Kebijakan	Rp 4.406.589.000
3	Penelitian	Rp 5.717.880.000
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp 1.305.599.000
5	Layanan Perkantoran	Rp16.893.682.000

Jumlah alokasi anggaran Kegiatan Penelitian pada Pusat Penelitian Kebijakan adalah sebesar Rp31.005.084.000,00 yang terdiri dari anggaran kinerja sebesar Rp12.805.803.000,00 dan untuk kegiatan yang bersifat pendukung/rutin sebesar Rp18.199.281.000,00.

Berikut ini adalah grafik rencana dan realisasi penyerapan anggaran Pusat Penelitian Kebijakan tahun anggaran 2020.

Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran Pusat Penelitian Kebijakan TA 2020





AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Puslitjak

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2020, Pusat Penelitian Kebijakan menetapkan satu Sasaran Kegiatan (SK) dengan tiga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai ukuran keberhasilan.

Sasaran Kegiatan (SK):
Tersedianya Hasil Penelitian yang Berkualitas dan Relevan sebagai Acuan dalam Mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kebudayaan

IKK #1

Jumlah Hasil Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan

IKK #2

Jumlah Hasil Kajian Isu Aktual Pendidikan dan Kebudayaan

IKK #3

Jumlah Hasil Fasilitasi dan Desiminasi Hasil Penelitian

Ketercapaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan selama tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut.

IKK #1 Jumlah Hasil Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2020			Target Renstra 2020	% Capaian Realisasi terhadap Target
Target	Realisasi	%		
18	36	200	18	200
Laporan Penelitian	Laporan Penelitian			

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini pada tahun 2020 adalah sebesar 200%, melebihi target yang telah ditentukan yaitu 18 laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut dihasilkan dari 36 kegiatan penelitian yang tidak hanya dilaksanakan oleh para peneliti, perekayasa, dan JFU Puslitjak, namun juga dilaksanakan melalui kerja sama dengan peneliti dari lembaga lain yaitu perguruan tinggi. Keberhasilan pencapaian target terjadi karena adanya perencanaan matang melalui penyusunan desain, pemilihan permasalahan, kesesuaian metode, dan waktu pelaksanaan. Capaian IKK ini didukung oleh kegiatan penelitian dengan 9 topik penelitian.



Berikut ini tabel yang menyajikan 36 judul kegiatan penelitian yang dikelompokkan berdasarkan topik penelitian.

Topik	No	Judul Penelitian
COVID-19 dan Kebudayaan	1	Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 terhadap Pelaku Budaya
	2	Digitalisasi Museum
Digitalisasi Pembelajaran	3	Pengembangan Portal Pembelajaran <i>Online</i> Berbasis <i>Artificial Intelligence</i> dalam Kerangka <i>Team Based Learning</i>
	4	Pengembangan Model PECS Berbasis Aplikasi Digital sebagai Upaya Penguatan Kecerdasan Visual Spasial bagi Anak Autistik
	5	Pembelajaran <i>Online</i> melalui <i>Platform Cultural Literacy for Digital Society (CLDS)</i>
Kampus Merdeka	6	Efektivitas Pembelajaran Daring di Perguruan Tinggi dalam Masa Pandemi
	7	Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh di Perguruan Tinggi dalam Masa Pandemi
Merdeka Belajar	8	Praktik Baik Pembelajaran Kreatif dan Inovatif sebagai Implementasi Merdeka Belajar
Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19	9	Memperkuat Kepemimpinan Instruksional (<i>Instructional Leadership</i>) di Sekolah pada Masa Pandemi
	10	Dampak BDR terhadap Kondisi Psikologis Anak
	11	Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan dan Keselamatan di Satuan Pendidikan pada Masa Kenormalan Baru
	12	Pembelajaran bagi Siswa Berkebutuhan Khusus dalam Masa Pandemi COVID-19
	13	Adaptasi Pembelajaran pada PAUD di Masa Pandemi COVID-19
	14	Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19
	15	Monitoring Implementasi Kurikulum Kondisi Khusus dan Modul Literasi dan Numerasi
Peningkatan Kualitas Guru	16	Evaluasi Sistem Pendidikan Keguruan
	17	Strategi Pengimbasan Pembelajaran Kreatif oleh Guru Penggerak
	18	Evaluasi Efektivitas Pelatihan Guru
	19	Program Pendampingan Literasi pada Masa Tatanan Baru bagi Guru SMPN
	20	Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Guru untuk Menunjang Profesionalisme Guru Berbasis Teknologi AI (<i>Artificial Intelligence</i>) dalam <i>Platform Android</i>
Penjaminan Mutu Pendidikan	21	Analisis Daya Serap Lulusan SMK Berdasarkan Kompetensi Keahlian
	22	Evaluasi Pelaksanaan Penilaian K13 pada Jenjang SD
	23	Analisis Hasil-hasil PISA sebagai Bahan Rekomendasi Peningkatan Mutu Pembelajaran
	24	Penggunaan Bahasa Ibu sebagai Strategi Pembelajaran Literasi Dasar di Kelas Awal

Topik	No	Judul Penelitian
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya	25	Dampak Pendaftaran Noken dalam ICH UNESCO
	26	Penguatan Kesadaran Sejarah di Kalangan Peserta Didik melalui Pembelajaran Sejarah Lokal dan Pelibatan Komunitas Sejarah
	27	Internalisasi Kesadaran Sejarah Jalur Rempah sebagai <i>National Brand</i> dan <i>National Pride</i>
	28	Penguatan Literasi dan Apresiasi Seni
	29	Okupasi Tenaga Kesejarahan di Indonesia
	30	Studi tentang Keberagaman, Toleransi/Intoleransi, dan Budaya Damai di SMA
	31	Repositori dan Preservasi <i>Digital History</i> Aktivitas Praktisi Seni di Era Pandemi COVID-19 di Tiga Kota (Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta)
Tata Kelola Pendidikan	32	Afirmasi Akses Pendidikan dalam Rangka Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun
	33	Evaluasi Pelaksanaan PPDB Tahun 2020
	34	Strategi Pembiayaan Pendidikan Tinggi
	35	Analisis Standar Biaya Operasional Nonpersonalia
	36	Model Penguatan Pendidikan Karakter dengan Konsep <i>Scaffolding</i> 4N Ki Hadjar Dewantara selama Belajar dari Rumah

Fokus penelitian yang dilakukan oleh Puslitjak berdasarkan pada permasalahan aktual dan kebutuhan strategis. Selain itu, Puslitjak berusaha untuk melakukan penelitian yang responsif, akomodatif, dan solutif terhadap dinamika tantangan dan kebutuhan saat ini dan ke depan.

HAMBATAN/ KENDALA

Adanya perubahan metode pelaksanaan penelitian dalam masa kenormalan baru yang memerlukan penyesuaian dalam proposal penelitian, rencana anggaran serta memerlukan pengulangan pada proses review sehingga mengakibatkan keterlambatan penandatanganan kontrak penelitian

LANGKAH ANTISIPASI

Melaksanakan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan

BEBERAPA REKOMENDASI HASIL PENELITIAN

Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 terhadap Pelaku Budaya (Topik: COVID-19 dan Kebudayaan)

Rekomendasi penelitian ini yaitu:

- Untuk mendorong optimalisasi *digital shifting* sebaiknya Pemerintah mendorong sinergi antarkementerian untuk mendukung penyediaan fasilitas jaringan internet. Selain itu, dalam mempersiapkan seniman dan pelaku industri kreatif untuk dapat bergeser ke *platform* digital, Pemerintah hendaknya mengambil peran sebagai fasilitator atau inisiator program-program pelatihan digital seperti monetisasi digital, pemasaran digital, pengurusan HAKI, hingga produksi konten.
- Untuk mendukung terciptanya *creative hub* yang optimal, Pemerintah sebaiknya juga menjadi fasilitator dan inisiator dalam hal manajemen ruang-ruang kreatif, misalnya dengan mengadakan pelatihan manajemen organisasi yang dapat mendukung pengelolaan *creative hub* yang baik. Pemerintah juga dapat mendirikan lebih banyak ruang yang berpotensi menjadi *creative hub* untuk memfasilitasi ragam subsektor, baik secara daring maupun luring. Dengan demikian, keberagaman kompetensi dan peluang kolaborasi yang lebih kompleks dapat terwadahi. Pemerintah juga hendaknya mendorong ruang-ruang kreatif yang ada untuk memiliki potensi *creative hub*. Ruang-ruang tersebut antara lain taman-taman budaya (sekarang UPTD) yang sudah berdiri di setiap daerah. Taman-taman budaya tersebut memiliki modal untuk menjadi wadah bagi beberapa aktivitas kreatif sekaligus, semisal seni rupa, tari, musik, pertunjukan, sastra, hingga film dan media baru.
- Untuk menggiatkan proses *reinventing the trend*, Pemerintah dapat melakukan upaya-upaya untuk mempertemukan para ahli dan akademisi di bidang industri kreatif dengan para seniman dan pelaku industri kreatif. Pertemuan tersebut dapat berupa pelatihan dan seminar dalam hal *trend forecasting* dan pelatihan model bisnis. Pelatihan semacam itu dapat mendorong terbukanya potensi-potensi pasar yang baru. Satu hal yang penting adalah upaya *reinventing* juga mesti diiringi dengan persebaran pengetahuan baru yang dihasilkan dari riset-riset ilmiah dan akademis. Dengan demikian, Pemerintah hendaknya mendukung terwujudnya riset-riset ilmiah tentang topik-topik yang berkaitan dengan industri kreatif.

Pengembangan Portal Pembelajaran *Online* Berbasis *Artificial Intelligence* dalam Kerangka *Team Based Learning* (Topik: Digitalisasi Pembelajaran)

Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi pembelajaran digital dalam kerangka TBL yang dilengkapi dengan teknologi AI untuk merekomendasikan sumber belajar dan memprediksi gaya belajar masing-masing siswa. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

- Penggunaan portal pembelajaran *online* berbasis *Artificial Intelligence* dalam kerangka *Team Based Learning* dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dari hasil uji *paired t-test* antara *pre-test* dan *post-test* tampak adanya kenaikan nilai rata-rata yang signifikan. Dari hasil uji coba juga didapatkan data hanya 78% siswa yang memiliki gawai atau perangkat untuk mengakses LMS yang telah dibuat. Sehingga masih ada 22% siswa yang kesulitan jika dilakukan pembelajaran *online*.
- Dari penelitian ini, model AI yang dikembangkan menggunakan algoritma berbasis *collaborative filtering* mampu melakukan prediksi gaya belajar berdasarkan aktivitas siswa dalam LMS. Selain itu, model AI yang dikembangkan berbasis *evolutionary algorithm* juga dapat digunakan dalam proses pembentukan kelompok dalam pembelajaran TBL.
- Sebaiknya pada awal pembelajaran *online* berbasis AI dengan TBL, siswa diberikan pendampingan lebih intensif. Setelah siswa terbiasa dengan pembelajaran *online* ini diharapkan kendala teknis penggunaan perangkat tidak terjadi.
- Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menganalisa perangkat yang dipakai siswa untuk mengikuti pembelajaran *online* berbasis AI dalam kerangka TBL.

Efektivitas Pembelajaran Daring di Perguruan Tinggi dalam Masa Pandemi (Topik: Kampus Merdeka)

Rekomendasi penelitian ini yaitu:

- Perlu adanya penyamaan persepsi mengenai konsep pembelajaran daring. Hal ini menyangkut netiket dan regulasi mekanisme pelaksanaan pembelajaran daring. Proporsionalitas terkait kegiatan sinkronos dan asinkronos dalam proses pembelajaran daring juga perlu diatur dengan baik supaya tidak terjadi tumpang tindih beban dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran daring. Kemampuan IT dalam pengelolaan *e-learning* menjadi wajib untuk terus dikembangkan.
- Pembatasan pengampunan mata kuliah dapat menjadi pertimbangan untuk beban kerja, mengingat semakin banyak jumlah mata kuliah, efektivitas perkuliahan juga menurun. Berbagai *platform* yang disediakan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh dosen supaya model pembelajaran daring yang dilakukan lebih variatif. Oleh karena itu, pelatihan terhadap dosen tidak hanya dalam hal pengelolaan sistem *e-learning*, melainkan model dan media pembelajaran yang inovatif dan mampu mengoptimalkan proses pembelajaran.
- Respon cepat, tanggap dan pelayanan terpadu terkait aduan selama proses pembelajaran daring perlu diupayakan oleh perguruan tinggi dan Pemerintah.



- Materi yang lebih bersifat teoritis dapat dilakukan secara penuh dengan pembelajaran daring dan tentunya dengan pilihan kegiatan yang bervariasi. Sedangkan materi yang lebih bersifat praktis sebagian dapat dilakukan melalui virtual laboratorium atau dengan model pembelajaran berbasis proyek dengan melibatkan unsur-unsur di sekitar lokasi mahasiswa dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Namun sebagian materi yang bersifat praktis lain yang melibatkan kemampuan kognitif dan *skill* dalam pelaksanaan praktikum di laboratorium atau studi kesehatan akan sangat sulit dilakukan.
- Regulasi ketat terkait pelaksanaan hal ini perlu disusun supaya capaian pembelajaran dapat tetap terlaksana dengan baik. Demikian juga dengan SN Dikti tentang standar proses pembelajaran dan sarana prasarana perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan sesudah masa pandemi COVID-19 berakhir. Kompetensi sosial, kepribadian dan pedagogik dosen perlu ditinjau ulang disesuaikan dengan kebiasaan baru (*new normal*).

Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19 (Topik: Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19)

Rekomendasi penelitian ini yaitu:

- Perlu adanya kebijakan baru yang direkomendasikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada masa pandemi COVID-19 dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran sekolah dasar, yaitu: a) kebijakan dalam PJJ dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran jarak jauh berbasis *Smart Education*; b) pengembangan *skill*/kompetensi berbasis TIK yang inovatif dan kreatif bagi pengguna (khususnya para guru SD dan SMP) yang disesuaikan dengan karakteristik dan gaya belajar dari siswa didiknya; c) pengembangan kerangka kerja *Smart Education* yang akan membantu di masa depan dalam membuat pendidikan adaptif dan transformatif. Pengembangannya dapat dilakukan secara dinamis sehingga dapat diserap untuk khalayak luas dari berbagai latar belakang budaya, agama, geografi, dan bahasa serta menciptakan solusi pembelajaran efektif untuk jangka panjang. Misalnya LMS pada Suku Dinas Pendidikan di DKI Jakarta di berbagai kecamatan atau wilayah kota.
- Bagi pengguna yang dalam hal ini Kepala Sekolah, Pengawas, Guru dan Orang Tua hendaknya dapat berpikir kritis dan inovatif dalam menangani karakteristik dan gaya belajar siswa disesuaikan dengan hobi atau kecenderungan siswa lebih menonjol atau dominan pada bidang tertentu, sehingga dapat memahami dengan tepat sasaran metode pembelajaran apa yang tepat untuk siswa yang beragam dan unik.
- Bagi peneliti yang berkaitan dengan topik ini dapat melakukan penelitian yang berfokus pada pilihan *platform* metode pendidikan yang sering digunakan untuk melakukan kolaborasi dengan teknik penelitian lainnya untuk dapat menciptakan model pendidikan yang efektif dan efisien terutama bukan hanya pada saat masa pandemi COVID-19 saja.



- Pemerintah Pusat dan Daerah perlu bersinergi mencapai mutu bersama, dan sebaiknya dalam melaksanakan program-program pendidikan baru dilakukan terlebih dahulu uji coba selama jangka waktu tertentu, selanjutnya dilakukan uji publik untuk mengetahui sejauh mana program tersebut apakah layak atau tidak jika dilaksanakan secara merata untuk di setiap wilayah di DKI Jakarta atau wilayah lain di Indonesia.

Program Pendampingan Literasi pada Masa Tatanan Baru bagi Guru SMPN (Topik: Peningkatan Kualitas Guru)

Rekomendasi penelitian ini yaitu:

- Mencermati saran, antusiasme, dan komitmen peserta (42 dari 48 guru berhasil menuntaskan program ini), pendampingan literasi berbasis kemitraan ini perlu dilanjutkan untuk peserta yang sama pada tahun berikutnya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sesuai hasil penelitian, beberapa hal perlu ditingkatkan terutama mengalokasikan waktu yang mencukupi untuk pengayaan literasi dan sesi literasi digital.
- Mengantisipasi potensi pandemi pada tahun mendatang, program pendampingan virtual berbasis web perlu dikombinasikan dengan *platform* yang menggunakan *video conference* dan/atau diintegrasikan langsung dengan menu *video conference*. Upaya ini dimaksudkan untuk efektivitas dan efisiensi pendampingan, sekaligus untuk mengembangkan literasi digital guru terutama dalam pembelajaran.
- Dalam rangka perluasan praktik baik, program pendampingan dapat melibatkan lebih banyak guru dari provinsi lain di seluruh Indonesia. Dengan kemudahan teknologi diharapkan peserta dapat berbagi praktik baik (*sharing best practices*) dengan guru-guru, tidak hanya yang bertugas di sekolah yang sama tetapi juga yang tergabung dalam MGMP di wilayah masing-masing.
- Untuk mendukung Gerakan Literasi Sekolah, program pendampingan berbasis kemitraan ini dapat dikembangkan untuk semua guru mata pelajaran, terutama di SMP untuk mendukung peningkatan skor PISA. Dua modul elektronik (untuk pengayaan dan pembelajaran literasi) yang menjadi luaran dari penelitian ini dapat diadopsi dan diadaptasi untuk program pendampingan bagi guru pengampu mata pelajaran yang variatif.

Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Guru untuk Menunjang Profesionalisme Guru Berbasis Teknologi AI (*Artificial Intelligence*) dalam Platform Android (Topik: Peningkatan Kualitas Guru)

Penelitian ini menghasilkan sistem penilaian kinerja guru berbasis teknologi *artificial intelligence* dalam *platform Android* untuk meningkatkan profesionalisme guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

- Aplikasi berbasis teknologi *artificial intelligence* dalam *platform Android* yang telah dikembangkan efektif menilai kinerja guru untuk mengembangkan inovasi pembelajaran.





- Aplikasi berbasis teknologi *artificial intelligence* dalam *platform Android* yang telah dikembangkan efektif menilai kinerja guru dalam melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
- Aplikasi berbasis teknologi *artificial intelligence* dalam *platform Android* yang telah dikembangkan efektif menilai kinerja guru dalam menulis ilmiah hasil pelaksanaan PTK.
- Program Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) yang dilakukan guru memerlukan proses yang bertahap dan dukungan berbagai pihak. Pendampingan oleh kepala sekolah dan pengawas sangat membantu mengarahkan profesionalitas guru baik dalam perencanaan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan aspek-aspek manajerial persekolahan maupun praktik nonmengajar lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka aplikasi yang telah dikembangkan akan semakin efektif apabila diterapkan pada setiap unit-unit MGMP guru dalam berbagai rumpun mata pelajaran.

Analisis Hasil-hasil PISA sebagai Bahan Rekomendasi Peningkatan Mutu Pembelajaran (Topik: Penjaminan Mutu Pendidikan)

Rekomendasi penelitian ini antara lain:

- Untuk meningkatkan kapasitas guru, Pemerintah perlu: a) memasukkan materi penguasaan kelas, umpan balik positif, strategi metakognisi, penumbuhan minat membaca siswa di dalam program peningkatan kapasitas guru oleh Pemerintah (seperti Program Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, PPG dan lainnya); b) memasukkan materi pada pelatihan terkait motivasi guru, penguasaan kelas, umpan balik positif, strategi metakognisi, penumbuhan minat membaca siswa dan sebagainya; c) memberikan bantuan kelengkapan TIK terutama untuk daerah 3T; dan d) menjadikan hasil monitoring dan evaluasi kinerja guru sebagai bahan perbaikan kebijakan dan program.
- Agar dapat meningkatkan literasi di tingkat sekolah, Pemerintah perlu: a) melakukan sosialisasi terkait Asesmen Nasional untuk memotivasi daerah menggalakkan program literasi; b) memberikan bantuan ke sekolah berupa sumber bacaan literasi, terutama untuk daerah 3T; c) menjadikan hasil monitoring dan evaluasi satuan pendidikan, daerah dan pusat sebagai bahan perbaikan untuk program peningkatan literasi sekolah periode selanjutnya.

Repository dan Preservasi *Digital History* Aktivitas Praktisi Seni di Era Pandemi COVID-19 di Tiga Kota (Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta) (Topik: Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya)

Rekomendasi penelitian ini yaitu:

- Pada masa pandemi, praktisi seni modern yang umumnya berada di perkotaan dapat bersiasat menggalang jaringannya masing-masing. Sementara bagi para pekerja seni tradisional yang tidak memiliki jaringan dan patron yang handal, maka era pandemi ini akan berdampak buruk bagi mereka.

- Bidang seni tradisional biasanya dilakukan tidak sendiri tetapi melibatkan banyak pemain (musik dan seni pertunjukkan). Kondisi ini kelihatannya belum tergarap dan diangkat ke permukaan oleh Ditjen Kebudayaan. Padahal mereka adalah pekerja seni yang lemah dalam jaringan, pekerjaan, ataupun ruang gerak. Dalam hal ini pihak berkompeten dapat mengkaji kehidupan mereka. Tentu dengan pilihan berapa banyak yang harus dipilih di beberapa kota dan bidang pertunjukkan apa saja. Oleh karena itu, pendataan aktivitas seni dalam Web Repositori perlu diperluas, dipilah dan dikategorikan, khusus untuk kesenian tradisional, agar dapat ditemukan solusi pembinaan yang sesuai bagi mereka, baik pada masa pandemi maupun sesudahnya.
- Umumnya para praktisi seni merupakan pekerja informal yang tidak memperoleh perlindungan kerja, jaminan kesehatan, tidak mendapat upah minimum, tidak mempunyai standar jam kerja, dan tidak mempunyai jaminan pensiun. Mereka termasuk bagian dari masyarakat yang rentan terdampak pandemi COVID-19. Akan tetapi pada umumnya juga sifat informal mereka sangat berbeda dengan para pekerja informal secara umum. Sebab meski ada kesamaan dalam modus operandinya, akan tetapi upah mereka kebanyakan didasarkan atas proyek yang dikerjakan baik berupa pesanan atau berupa proyek penawaran kepada pihak yang membutuhkan. Walaupun adanya ketidakpastian ekonomi yang terjadi selama pandemi, akan tetapi mereka dapat *survive* sebab mempunyai kemampuan yang berbeda dengan para pekerja informal pada umumnya. Kemampuan yang tidak tergantung oleh pihak-pihak tertentu itulah yang menjadi daya pendorong untuk bertahan dan keluar dari krisis berkepanjangan. Dalam hal ini kiranya pihak Pemerintah patut mendukung dengan memberikan sarana dan ruang ekspresi seni, khususnya kepada mereka yang berada di luar Jakarta.
- Produk preservasi Web Digital yang sudah ada ini dapat bermanfaat secara akademis dan keilmuan sebab dapat dijadikan bahan riset bagi yang berkepentingan dalam dan luar negeri, sekaligus dapat dijadikan sebagai contoh model atau pola yang positif bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (cq. Ditjen Kebudayaan atau Balitbang Kemendikbud), Pemerintah Daerah, museum daerah atau kota, lembaga swasta, organisasi seni, komunitas seni, dan lembaga lain. Atas dasar itu, kami bersedia untuk membantu membuat Web yang serupa, agar data-data aktivitas berkesenian para pelaku seni di berbagai kota dan daerah dapat disimpan, dibaca, dan disebar dalam bentuk Web Digital Repositori.
- Sangat disayangkan jika produk Web ini hanya bersifat statis dan stagnan sebab tidak ada moderator atau operatornya yang menjalankan. Oleh sebab itu, diperlukan publikasi *soft launching* yang ditujukan kepada para pegiat seni dan media massa.



- Selain itu, juga sangat disayangkan jika proyek pembuatan Web ini tidak berkelanjutan untuk menampung data kreativitas seni di kota-kota lain di Indonesia, baik selama masa pandemi ini maupun sesudahnya. Sebab *pilot project* Web ini diharapkan akan menjadi *prototipe* yang dapat diterapkan di berbagai kota-kota lain di Indonesia, terutama kota-kota yang sering melakukan seni pertunjukkan, seperti Medan, Padang, Lampung, Malang, Bali, Banjarmasin, dan Makassar baik dalam bidang seni kontemporer, terlebih lagi dalam bidang seni tradisional.

Model Penguatan Pendidikan Karakter dengan Konsep *Scaffolding* 4N Ki Hadjar Dewantara selama Belajar dari Rumah (Topik: Tata Kelola Pendidikan)

Rekomendasi penelitian ini yaitu:

- Dinas Pendidikan perlu membuat kebijakan yang mengatur satuan pendidikan untuk mengelola isi kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang esensial dan dibutuhkan siswa ketika Belajar dari Rumah (BDR).
- Dinas Pendidikan perlu melakukan pendampingan dalam sosialisasi dan kerja sama guru dan orang tua dalam melakukan pendampingan agar siswa bisa tertib dan jujur, serta punya semangat ketika BDR.
- Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud perlu membuat suatu kebijakan agar bisa mendorong guru berinovasi mengembangkan isi pembelajaran/bahan ajar yang mengintegrasikan penguatan karakter sesuai dengan jenis BDR yang digunakan menggunakan konsep *scaffolding* 4N Ki Hadjar Dewantara.
- Kemendikbud dan kementerian terkait perlu menumbuhkan kembali peran Tri Pusat Pendidikan (Masyarakat/Kelurahan, Sekolah, Orang Tua) berbasis zonasi dalam menunjang terlaksananya kegiatan BDR yang bermutu.
- Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud perlu mengembangkan dan melakukan pelatihan dalam menggunakan fasilitas IT untuk bisa digunakan dalam melakukan pembelajaran dan penilaian yang akuntabel ketika BDR.
- Ditjen GTK perlu melakukan pemetaan tentang peningkatan kompetensi guru, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dalam rangka mendukung pembelajaran di era revolusi industri 4.0.
- Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud perlu membuat suatu kebijakan yang jelas terkait dengan kompetensi esensial, isi pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian khususnya dalam rangka BDR bagi semua jenjang pendidikan.



IKK #2 Jumlah Hasil Kajian Isu Aktual Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2020			Target Renstra 2020	% Capaian Realisasi terhadap Target
Target	Realisasi	%		
18	18	100	18	100
Laporan Penelitian	Laporan Penelitian			

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 18 laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut dihasilkan dari 18 kegiatan kajian isu aktual yang dilaksanakan oleh para peneliti, perekayasa, dan JFU Puslitjak. Capaian IKK ini didukung oleh kegiatan kajian isu aktual dengan 5 topik kajian isu aktual.



Berikut ini tabel yang menyajikan 18 judul kegiatan kajian isu aktual yang dikelompokkan berdasarkan topik kajian isu aktual.

Topik	No	Judul Kajian Isu Aktual
Kampus Merdeka	1	Kesiapan Perguruan Tinggi dalam Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka
Merdeka Belajar	2	Evaluasi Hasil Akreditasi Sekolah
	3	Kinerja Guru dalam Mengimplementasikan Merdeka Belajar
	4	Analisis Regulasi Guru untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran
	5	Kesiapan Sekolah Menghadapi Asesmen Kompetensi Minimal
Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19	6	Pemetaan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Lulusan Baru Perguruan Tinggi di Indonesia
	7	Eskplorasi Praktik Baik (<i>Best Practices</i>) Lulusan-Baru Perguruan Tinggi dalam Menavigasi Transisi Kepemudaan di Masa Pandemi
	8	Pelaksanaan Pembelajaran dari Rumah dalam Masa Pencegahan COVID-19
	9	Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah dalam Masa Kenormalan Baru
	10	Studi Evaluasi Belajar dari Rumah Tahun Ajaran 2020/2021
	11	Monitoring Kebijakan Pendidikan Jarak Jauh pada Masa Pandemi melalui Analisis Percakapan di Media Sosial
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya	12	Pengayaan Seni dalam Mendukung Industri Kreatif
Tata Kelola Pendidikan	13	Kajian Alternatif Model Penggabungan SMK dengan SMA
	14	Pembelajaran Vokasi Fungsional melalui Satuan Pendidikan Non-Formal
	15	Analisis Kebutuhan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Analisis Kebutuhan Biaya PAUDDASMEN)
	16	Pengelolaan Keragaman Peserta Didik Pasca-Zonasi
	17	Pendidikan Vokasi: Menjaga Relevansi SMK di Abad 21
	18	Strategi Menghadapi Anak Putus Sekolah

HAMBATAN/ KENDALA

Adanya perubahan metode pelaksanaan kegiatan dalam masa pandemi COVID-19 yang memerlukan penyesuaian dalam penganggaran hingga metode pelaksanaan

LANGKAH ANTISIPASI

Penelitian lapangan diubah menjadi penelitian *desk study* dan mengubah sebagian desain kegiatan rapat tatap muka menjadi pertemuan daring (*Zoom meeting*)

BEBERAPA REKOMENDASI HASIL KAJIAN ISU AKTUAL

Kesiapan Perguruan Tinggi dalam Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka (Topik: Kampus Merdeka)

Rekomendasi penelitian ini antara lain:

- Penyederhanaan jumlah dosen *home base* dalam pembukaan prodi baru agar lebih fleksibel tidak harus memenuhi persyaratan minimal 5 orang, disertai dengan kemudahan memperoleh akreditasi agar dapat meluluskan mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi.
- Pembukaan prodi baru yang tidak hanya terfokus pada bidang studi STEM, tetapi juga bidang studi utama sosial, humaniora, dan lain-lain untuk membuka prodi S2 dan S3, selain sudah siap juga menjaga kesinambungan linearitas bagi mahasiswa (juga dosen) yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
- Pemberian insentif dana bagi perguruan tinggi dan prodi yang akan menuju internasionalisasi, terutama dalam memenuhi persyaratan sebagai *World Class University*.
- Perluasan pemberian pendampingan insentif dana bagi mahasiswa yang akan mengambil hak belajar selama dua semester di luar prodi dan di luar kampus, sesuai dengan pilihan dan pengembangan kompetensinya. Pihak Ditjen Dikti telah mencanangkan untuk memberikan bantuan dana kepada mahasiswa (UKT, pulsa, dan transport), tapi jumlah mahasiswa yang dapat menerima hanya relatif sedikit 20–30 orang. Tentu menjadi persoalan bagi PT yang memiliki jumlah mahasiswa besar.
- Sejauh ini ekuivalen SKS dan jam kegiatan masih menjadi persoalan. Pengalaman PT dalam pemberian SKS mata kuliah berkisar antara 2–4 SKS disesuaikan dengan jam kuliah dosen. Ditinjau dari jam kegiatan ini hanya menempuh waktu antara 32–64 jam kuliah untuk pemenuhan 2–4 SKS, sehingga keterlibatan mencapai jumlah 20 SKS memerlukan jam kegiatan yang relatif besar. Untuk itu perlu ditinjau kembali dan disederhanakan pencapaian 20 SKS/semester dalam pemenuhan kebijakan kampus. Rekognisi bisa dilakukan untuk mencapai 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun, tetapi itu diperkirakan akan memberatkan beban mahasiswa dan dosen pembimbing. Perluasan mata kuliah melalui rekognisi memerlukan sistem di dalam maupun di luar prodi/kampus yang jelas yang akan mengarahkan pilihan dan panduan mahasiswa dan dosen.
- Perlu adanya aturan terbaru beban dosen sesuai perubahan kurikulum dari penerapan kebijakan Kampus Merdeka, terutama pemenuhan hak belajar mahasiswa 3 (tiga) semester belajar di luar kampus.

Analisis Regulasi Guru untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran (Topik: Merdeka Belajar)

Rekomendasi penelitian ini yaitu:

- Peningkatan kualitas rekrutmen guru dengan cara sistem perekrutan guru CPNS tidak dapat disamakan dengan sistem perekrutan PNS pada umumnya karena tidak dapat mengukur kompetensi mengajar, komitmen, dan motivasi guru. Untuk itu, sistem perekrutan CPNS seyogianya melalui jalur yang berbeda dengan instrumen rekrutmen yang mampu menerjemahkan standar kompetensi guru dalam Permendikbud 16/2007. Perekrutan melalui jalur PPPK harus segera direalisasikan karena setidaknya ada dua hal menarik dari mekanisme seleksi PPPK ini. Pertama, bahwa untuk memenuhi kompetensi teknis, tidak seperti seleksi CPNS yang menggunakan ujian kompetensi bidang, calon guru PPPK harus lulus uji kompetensi. Untuk mengikuti uji kompetensi guru sendiri, seseorang harus terlebih dahulu lulus dari Program Profesi Guru (PPG), yaitu sebuah program pendidikan untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme guru. Kedua, dalam seleksi kompetensi PPPK ini, selain kompetensi teknis juga diperhitungkan dua kompetensi lain, yaitu kompetensi manajerial dan kompetensi sosial budaya. Selain itu, perekrutan melalui jalur sekolah sudah selayaknya ditiadakan karena hanya akan menambah preseden buruk di kemudian hari.
- Uji Kompetensi dilakukan secara menyeluruh kepada semua guru di Indonesia. Uji Kompetensi guru idealnya tidak hanya mengukur kompetensi pedagogik dan profesional, tetapi juga kompetensi sosial dan kepribadian. Ranah Uji Kompetensi juga tidak hanya pada penilaian aspek kognitif tetapi juga ranah sikap dan karakter. Oleh karenanya, diperlukan variasi metode dalam Uji Kompetensi yang tidak hanya bergantung pada soal-soal *multiple choice*, tetapi juga membuka kemungkinan pada jenis metode asesmen lain seperti: wawancara, diskusi kelompok, instrumen asesmen psikologis, *micro teaching*, dan lain-lain.
- Meninjau kembali sistem penilaian angka kredit bagi guru. Angka kredit idealnya tidak hanya mendorong guru untuk memiliki kecakapan dan pengetahuan akademik yang baik tetapi juga menjamin peningkatan mutu pembelajaran yang dijalankan. Penilaian angka kredit harus membuka ruang yang luas bagi penilaian dalam bentuk observasi yang menunjukkan performa guru saat mengajar, dan bukan sekadar berbasis bukti administratif.
- Mengoptimalkan pendampingan guru, khususnya dengan melibatkan rekan sejawat melalui kegiatan kolektif, serta meningkatkan kapasitas kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam melakukan pembimbingan dan supervisi pendidikan.
- Perlunya regulasi untuk menguatkan peran KKG/MGMP sebagai ruang belajar bersama bagi guru. KKG atau MGMP yang aktif dapat memfasilitasi guru meningkatkan kinerjanya, mulai dari perencanaan pembelajaran, metode pembelajaran, hingga penilaian.



Pelaksanaan Pembelajaran dari Rumah dalam Masa Pencegahan COVID-19 (Topik: Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19)

Rekomendasi penelitian ini antara lain:

- Dokumen Komprehensif yang dapat menjadi acuan pembelajaran dari rumah pada masa darurat perlu dirumuskan agar para guru dan orang tua dapat lebih dini membekali diri dengan keterampilan dasar, Pemerintah Daerah dapat mengantisipasi terobosan kebijakan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menyiapkan infrastruktur yang diperlukan sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal.
- Penguatan literasi teknologi informasi di kalangan guru dan tenaga kependidikan perlu menjadi salah satu agenda penting peningkatan kapasitas keprofesian berkelanjutan. Hal ini dapat diinisiasi oleh Kemendikbud melalui lembaga-lembaga pelatihan seperti P4TK, oleh Pemerintah Daerah dengan menggerakkan organisasi komunitas profesi (KKG/MGMP/KKKS/MKKS) di wilayah masing-masing, dan oleh sekolah dengan menyediakan dan/atau memfasilitasi keikutsertaan GTK dalam *workshop* dan pelatihan atau mendorong GTK untuk belajar secara mandiri dari berbagai sumber.
- Pemerataan akses pada teknologi digital perlu terus diupayakan melalui sinergi pemerintah dan swasta. Sekolah-sekolah di daerah tertinggal perlu memperoleh perlakuan afirmatif dengan berbagai strategi baik jangka panjang seperti memperluas jaringan internet, memasang akses internet gratis di berbagai titik, dan menyediakan perangkat digital, maupun strategi jangka pendek seperti mengirimkan materi-materi pembelajaran digital yang dapat diakses secara luring. Bagi daerah-daerah yang telah memiliki jangkauan internet, fasilitas data internet berbasis seluler bagi guru perlu diberikan.
- Penyederhanaan kurikulum perlu dilakukan terlepas dari kondisi normal atau darurat, sehingga sekolah dan guru dapat lebih leluasa menyesuaikan pembelajaran sesuai konteks yang dihadapi oleh mereka, terutama dalam situasi darurat. Pembelajaran yang berorientasi penguasaan materi perlu digantikan dengan pembelajaran yang berorientasi kompetensi abad 21.
- Memperkuat peran serta orang tua dalam belajar anak perlu terus dilakukan pasca-COVID-19. Salah satunya adalah dengan cara memasukkan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas orang tua sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah. Jenis kegiatan dan materinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Bagi sekolah-sekolah tertentu yang sebagian besar siswanya berasal dari keluarga kurang mampu, proporsi tertentu dari anggaran pembinaan tersebut dapat disisihkan dari dana BOS.



Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah dalam Masa Kenormalan Baru (Topik: Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19)

Rekomendasi penelitian ini antara lain:

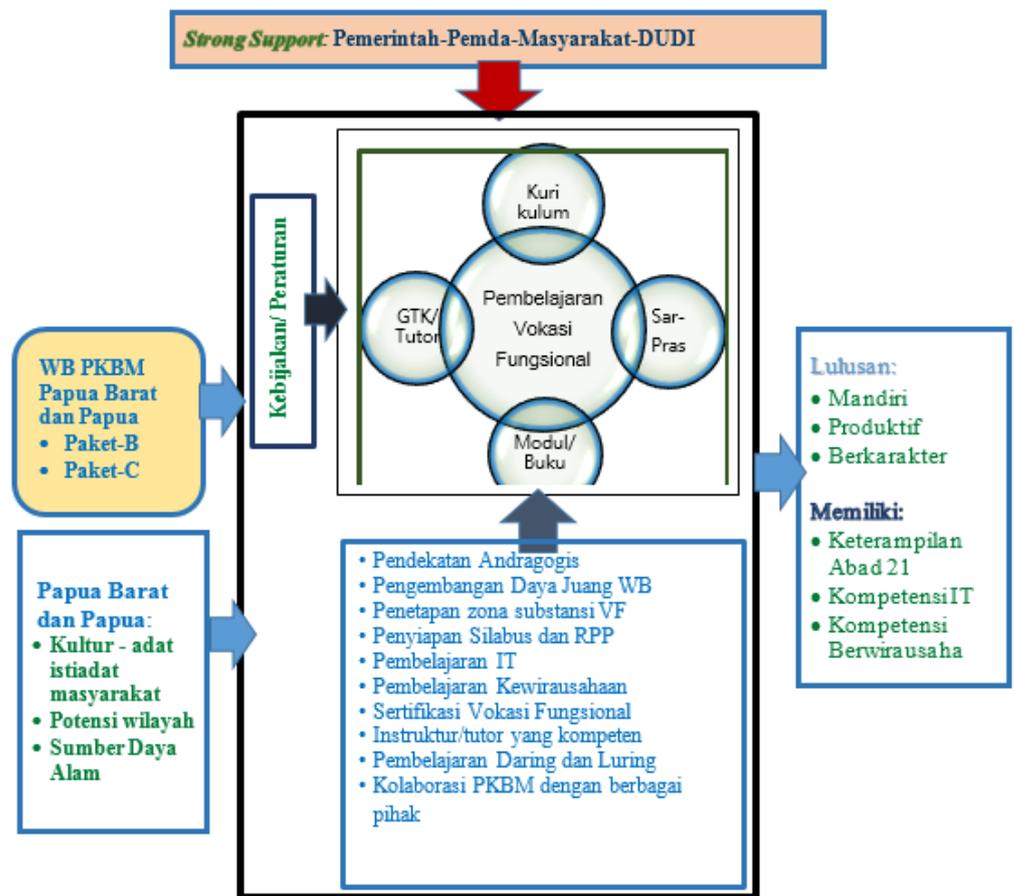
- Pemerintah Daerah yang akan melakukan pembukaan kembali sekolah perlu memastikan kondisi keamanan dan kesehatan di daerahnya, terutama tingkat penyebaran virus, serta disiplin dan penerapan protokol kesehatan. Sekolah yang aman dan sehat tidak hanya bergantung pada kondisi sarana dan penerapan protokol kesehatan di sekolah, tetapi juga kondisi di luar sekolah. Kesehatan mental siswa dan guru juga perlu mendapat perhatian.
- Dinas Pendidikan perlu membentuk Pos Pendidikan sebagai upaya serius menangani masalah pendidikan di masa pandemi. Pos Pendidikan merupakan bagian dari Gugus Tugas COVID-19 di daerah yang bertugas melakukan koordinasi untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 bagi warga sekolah melakukan pendataan kondisi kesehatan warga sekolah, akses terhadap listrik dan internet, serta kesiapan dan kebutuhan belajar siswa (SE Sekjen Kemendikbud 15/2020). Dalam membentuk Pos Pendidikan, Dinas Pendidikan dapat memaksimalkan struktur yang sudah ada sebelumnya, seperti Gugus Unit Kesehatan Sekolah di daerah yang dilengkapi dengan unsur lainnya.
- Dinas Pendidikan perlu melakukan pendataan dan pengecekan kondisi kesehatan warga sekolah secara berkala. Pendataan kondisi kesehatan meliputi data: a) orang tanpa gejala; b) orang dalam pemantauan; c) pasien dalam pengawasan; dan d) terkonfirmasi positif. Dinas Pendidikan bersama Dinas Kesehatan juga perlu melakukan tes kesehatan secara rutin, terutama bagi guru dan tenaga kependidikan, untuk menjamin dan memantau kondisi kesehatan sebelum dan selama pembukaan kembali sekolah.
- Menjamin sekolah memiliki sarana kebersihan dan kesehatan yang memadai, meliputi kecukupan air, toilet, sarana cuci tangan pakai sabun, alat pengukur suhu tubuh tembak, dan ruang UKS. Jumlah dan kondisi minimum kelengkapan sarana dan prasarana tersebut telah diatur dalam Permendiknas 24/2007. Perbaikan dan pemeliharaan berbagai sarana dan prasarana tersebut dapat menggunakan dana BOS sebagaimana diatur dalam Permendikbud 8/2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.
- Sekolah perlu melibatkan dukungan orang tua baik dalam persiapan maupun pelaksanaan belajar tatap muka melalui Komite Sekolah dan Paguyuban Orang Tua. Dukungan tidak hanya berkenaan dengan “izin orang tua” dalam penyelenggaraan belajar tatap muka, tetapi terutama peran orang tua dalam menjamin siswa aman selama menuju dan pulang dari sekolah, membekali siswa dengan masker, makan dan minum, serta mendukung sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan dan memenuhi sarana dan prasarana kebersihan yang diperlukan.



Pembelajaran Vokasi Fungsional melalui Satuan Pendidikan Non-Formal (Topik: Tata Kelola Pendidikan)

Rekomendasi penelitian ini antara lain:

- Pembelajaran Vokasi Fungsional (VF) di PKBM di PB dan P tidak dapat hanya diatasi secara parsial pada bagian-bagian atau komponen tertentu saja. Upaya agar pembelajaran VF dapat bermanfaat bagi lulusan PKBM di PB dan P utamanya untuk meningkatkan keberdayaan mereka secara ekonomi, diperlukan upaya secara makro sebagai sebuah sistem melibatkan berbagai komponen pemangku kepentingan dengan memberikan langkah-langkah aksi agar dapat diterapkan dan berhasil guna. Oleh sebab itu, saran utama pada pembelajaran VF adalah model pembelajaran VF bagi WB PKBM PB dan P yang dituangkan dalam bentuk diagram model berikut.



Model Pembelajaran Vokasi Fungsional bagi WB PKBM di PB dan P

- Model Pembelajaran VF seperti dimuat dalam diagram di atas sepenuhnya sudah mensinergikan berbagai potensi PB dan P, di antaranya: a) kultur adat istiadat masyarakat setempat; b) potensi wilayah seperti gunung, pantai, hutan, kota besar, kota kecil, desa; dan c) sumber daya alam. Namun VF ini memerlukan pemenuhan aspek-aspek pendukung mencakup: a) pendekatan andragogi karena WB umumnya berusia dewasa yang memiliki keterbatasan; b) daya juang bagi WB; c) penetapan zona substansi VF sesuai dengan tingkat 'maju-tertinggal' dan zona ekologis alam wilayah; d) penyiapan silabus dan RPP; e) pemberian pembelajaran kewirausahaan sebagai bekal 'pendamping' pembelajaran VF; f) sertifikasi VF; g) pembelajaran daring dan luring sesuai kemajuan zaman dan sesuai dengan kesiapan WB; dan h) keberdayaan pengelola PKBM untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Model Pembelajaran VF memiliki implikasi dalam hal: a) nomenklatur pembelajaran vokasi fungsional; b) pengkajian kembali kurikulum khususnya keterampilan yang dapat memberi manfaat bagi lulusannya; c) pemenuhan aspek-aspek Program Pembelajaran Vokasi Fungsional di PKBM khususnya di Papua dan Papua Barat; d) perlu intervensi Pemerintah tentang kebijakan dan implementasi pembelajaran vokasi fungsional; e) perlu peran Pemda dalam pelaksanaan pembelajaran vokasi fungsional dan berkolaborasi dengan berbagai pihak; f) perlu dukungan masyarakat dan DUDI agar program VF dapat terlaksana; serta g) pengelola PKBM perlu melakukan langkah-langkah strategis tentang pembelajaran VF.
- Pemerintah sebaiknya melakukan langkah-langkah: a) menetapkan VF sebagai mata pelajaran tersendiri di dalam struktur kurikulum; b) mengkaji kembali berbagai kebijakan tentang PKBM dan struktur kurikulumnya untuk memastikan pembelajaran VF bermanfaat bagi WB PKBM di PB dan P; c) dapat menterjemahkan pemenuhan 8 aspek pembelajaran VF dalam bentuk pembinaan teknis, petunjuk teknis, pedoman, panduan dan sebagainya; serta d) merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan aspek pelaksanaan pembelajaran VF yang terdiri atas kurikulum, sarana prasarana, instruktur, dan modul ajar atau buku.
- Pemda sebaiknya: a) mengkaji potensi wilayah yang dapat dijadikan model pembelajaran VF; b) mendata PKBM secara lengkap termasuk WB; c) mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mandiri secara mandiri yang dapat ditempuh melalui pembelajaran VF di PKBM; d) sebagai sumber informasi dari Pemerintah terkait dengan pembelajaran VF; e) mendorong munculnya mata anggaran pembelajaran VF pada rencana daerah; dan f) mendorong PKBM untuk meningkatkan kualitas pembelajaran VF.



IKK #3 Jumlah Hasil Fasilitasi dan Desiminasi Hasil Penelitian

Tahun 2020			Target Renstra 2020	% Capaian Realisasi terhadap Target
Target	Realisasi	%		
8 Dokumen	10 Dokumen	125	8	125

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini pada tahun 2020 adalah sebesar 125%, melebihi target yang telah ditentukan yaitu 8 dokumen. Realisasi 10 dokumen dihasilkan dari 10 kegiatan yang terdiri dari 7 kegiatan desiminasi hasil penelitian dan 3 kegiatan fasilitasi hasil penelitian.



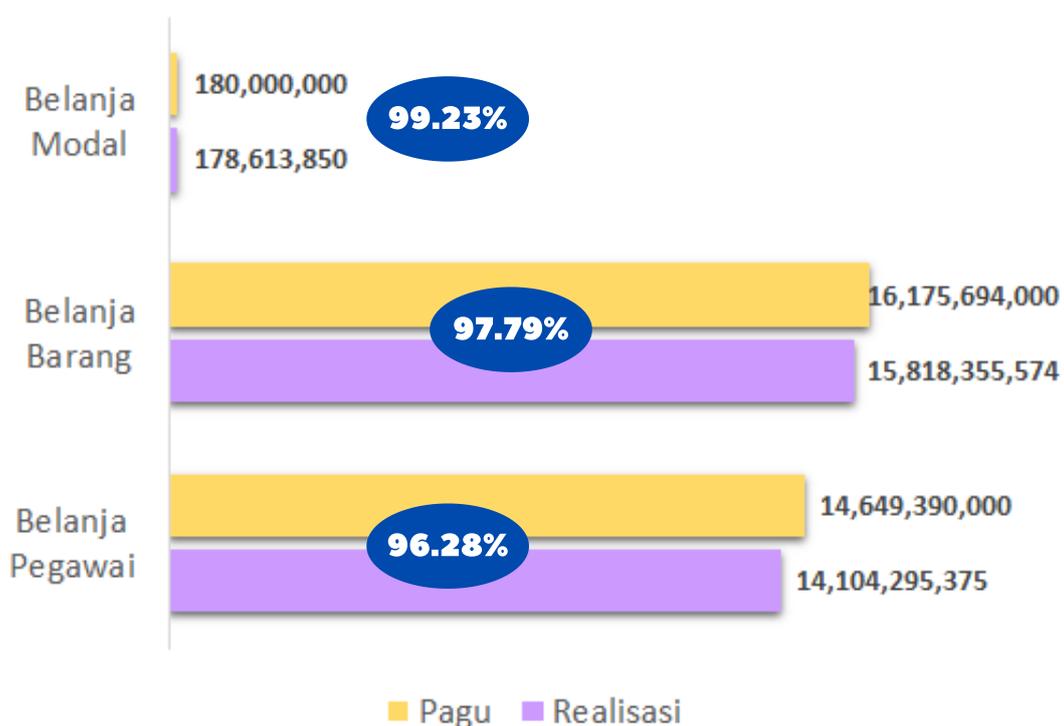
B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Pusat Penelitian Kebijakan dalam DIPA tahun 2020 adalah sebesar Rp31.005.084.000,00. Dari pagu anggaran tersebut, berhasil direalisasikan sebesar Rp30.101.264.799 dengan persentase daya serap sebesar 97,08%. Pagu sebesar tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian satu Sasaran Kegiatan dengan tiga Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut ini rincian penyerapan anggaran pada masing-masing indikator kinerja.

NO.	SASARAN STRATEGIS	NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI	REALISASI	%
1	MENINGKATNYA JUMLAH HASIL PENELITIAN YANG BERKUALITAS DAN RELEVAN SEBAGAI ACUAN DALAM Mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	1	Jumlah Hasil Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan	18 Laporan Penelitian	36 200%	7,473,600,000	5,717,880,000	5,717,519,000	99.99%
		2	Jumlah Hasil Kajian Isu Aktual Pendidikan dan Kebudayaan	18 Laporan Penelitian	18 100%	2,376,000,000	2,681,334,000	2,674,339,000	99.74%
		3	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Desiminasi Hasil Penelitian	8 Dokumen	10 125%	5,921,668,000	4,406,589,000	4,152,628,775	94.24%

NO.	OUTPUT	TARGET 2020	REALISASI 2020	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI	REALISASI	%
1	Kajian Isu Aktual	18 Naskah Kebijakan	18 100%	2,376,000,000	2,681,334,000	2,674,339,000	99.74%
2	Fasilitasi dan Desiminasi Hasil Penelitian Kebijakan	10 Dokumen	10 100%	5,921,668,000	4,406,589,000	4,152,628,775	94.24%
3	Penelitian	36 Laporan	36 100%	7,473,600,000	5,717,880,000	5,717,519,000	99.99%
4	Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan	1 100%	1,000,000,000	1,305,599,000	1,250,032,108	95.74%
5	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 100%	20,018,894,000	16,893,682,000	16,306,745,916	96.53%

Realisasi Anggaran per Jenis Belanja



B. Efisiensi Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2020, Pusat Penelitian Kebijakan berhasil melakukan efisiensi anggaran dengan nilai efisiensi anggaran sebesar 24,36%. Hasil efisiensi tersebut berasal dari penghematan pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Target dapat direalisasikan dengan anggaran yang lebih sedikit tanpa menurunkan kualitas output.

Adanya sisa anggaran sebanyak 2.92% atau sebesar Rp903.819.201,00 berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp545.094.625,00; Belanja Barang sebesar Rp357.338.426,00; dan Belanja Modal sebesar Rp1.386.150,00. Sisa anggaran yang berasal dari Belanja Barang disebabkan oleh ketersediaan waktu untuk melakukan pencetakan buku tidak mencukupi, sedangkan sisa anggaran yang berasal dari Belanja Pegawai disebabkan oleh tunjangan KPA yang tidak dapat dibayarkan karena Kapuslitjak masih dijabat oleh pelaksana tugas (plt.) dan adanya selisih dari tunjangan dan uang makan pegawai.

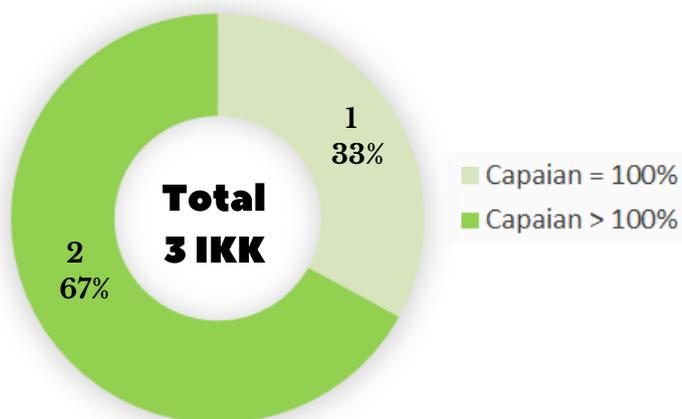
04

PENUTUP

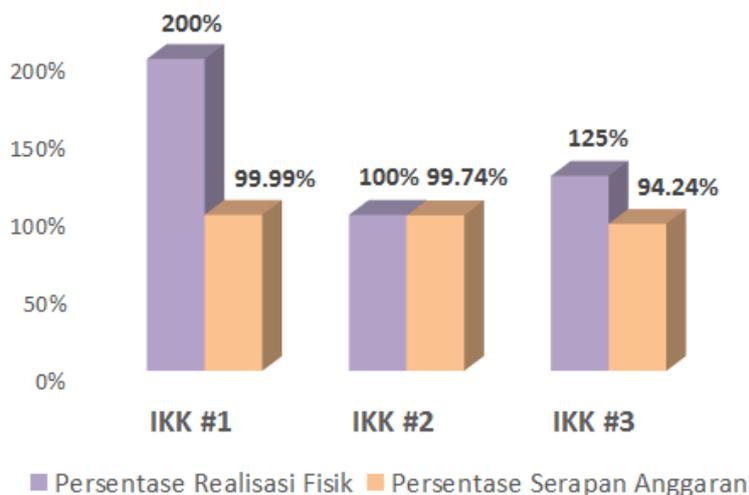
A. Kesimpulan

- Selama tahun 2020, Puslitjak berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Proporsi Persentase Pencapaian IKK Tahun 2020



Perbandingan Serapan Anggaran dan Realisasi Fisik per IKK Tahun 2020



- Laporan Kinerja Puslitjak Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 (visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis dan program) serta tugas pokok dan fungsi kepada semua elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama tahun 2020.
- Target IKK Tahun 2020 untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 secara umum dapat teralisasi. Hal ini didukung fakta bahwa kinerja Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2020 telah berhasil merealisasikan IKK beserta target output kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Balitbang dan Perbukuan yang dituangkan dalam Renstra Balitbang dan Perbukuan 2020-2024.
- Dalam kaitan dengan ketercapaian misi, Puslitjak telah melaksanakan program penelitian dan pengembangan dengan menitikberatkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan.
- Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun ini, merupakan dasar berpijak yang kuat bagi Puslitjak untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan pada tahun-tahun berikutnya, dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan pada masa mendatang akan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

B. Rekomendasi

Agar kinerja yang dicapai dapat berkelanjutan, diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama antar berbagai pihak untuk mewujudkan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke depan, antara lain:

- Peningkatan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pemantapan program kegiatan penelitian dan pengembangan antar instansi dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan dan kebudayaan.
- Menyelesaikan segera permasalahan yang menghambat kegiatan penelitian, di antaranya penanganan koordinasi, perencanaan pendanaan, dan perencanaan waktu yang lebih baik.
- Terus meningkatkan disiplin, tata kerja, kerja sama, koordinasi dengan berbagai pihak, profesionalisme dan *good governance* dalam rangka meningkatkan kinerja.
- Laporan Kinerja digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Puslitjak Tahun 2020 - Awal
2. Perjanjian Kinerja Puslitjak Tahun 2020 - Revisi
3. Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2020





LAMPIRAN 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pusat Penelitian Kebijakan Dengan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IRSYAD ZAMJANI
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : TOTOK SUPRAYITNO
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan dan Perbukuan

Jakarta, Juni 2020
Plt. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan

TOTOK SUPRAYITNO

IRSYAD ZAMJANI

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	2	3	4
1	Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan	Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan	18
		Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan	18
		Jumlah hasil penjaminan mutu	8

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kajian Isu Aktual	Rp 2.750.948.000
2	Fasilitasi dan Desiminasi Hasil Penelitian Kebijakan	Rp 4.820.256.000
3	Penelitian	Rp 5.238.000.000
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp 1.302.198.000
5	Layanan Perkantoran	Rp 20.018.894.000

Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan dan Perbukuan



TOTOK SUPRAYITNO

Jakarta, Juni 2020
Plt. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan



IRSYAD ZAMIANI



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan
dengan
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irsyad Zamjani

Jabatan : Plt. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Totok Suprayitno

Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Plt. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan dan Perbukuan,

Totok Suprayitno

Jakarta, Desember 2020
Plt. Kepala Pusat Penelitian
Kebijakan,

Irsyad Zamjani

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan	Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan	18 laporan penelitian
		Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan	18 laporan penelitian
		Jumlah hasil fasilitasi dan diseminasi hasil penelitian	8 dokumen

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kajian Isu Aktual	Rp 2.681.334.000
2	Fasilitasi dan Desiminasi Hasil Penelitian Kebijakan	Rp 4.406.589.000
3	Penelitian	Rp 5.717.880.000
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp 1.305.599.000
5	Layanan Perkantoran	Rp 16.893.682.000

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan,


Totok Suprayitno

Jakarta, Desember 2020
Plt. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan,


Irsyad Zamjani

LAMPIRAN 3

PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020 PUSLITJAK BALITBANG DAN PERBUKUAN KEMENDIKBUD

NO.	SASARAN STRATEGIS	NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI	REALISASI	%
1	MENINGKATNYA JUMLAH HASIL PENELITIAN YANG BERKUALITAS DAN RELEVAN SEBAGAI ACUAN DALAM Mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	1	Jumlah Hasil Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan	18 Laporan Penelitian	36 200%	7,473,600,000	5,717,880,000	5,717,519,000	99.99%
		2	Jumlah Hasil Kajian Isu Aktual Pendidikan dan Kebudayaan	18 Laporan Penelitian	18 100%	2,376,000,000	2,681,334,000	2,674,339,000	99.74%
		3	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Desiminasi Hasil Penelitian	8 Dokumen	10 125%	5,921,668,000	4,406,589,000	4,152,628,775	94.24%

NO.	OUTPUT	TARGET 2020	REALISASI 2020	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI	REALISASI	%
1	Kajian Isu Aktual	18 Naskah Kebijakan	18 100%	2,376,000,000	2,681,334,000	2,674,339,000	99.74%
2	Fasilitasi dan Desiminasi Hasil Penelitian Kebijakan	10 Dokumen	10 100%	5,921,668,000	4,406,589,000	4,152,628,775	94.24%
3	Penelitian	36 Laporan	36 100%	7,473,600,000	5,717,880,000	5,717,519,000	99.99%
4	Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan	1 100%	1,000,000,000	1,305,599,000	1,250,032,108	95.74%
5	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 100%	20,018,894,000	16,893,682,000	16,306,745,916	96.53%